



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA SELATAN,**

Menimbang

- : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa pupuk merupakan bahan kimia atau organisme bagi tanaman yang memerlukan penanganan secara khusus, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna budidaya alam dan lingkungan hidup;
- c. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana produksi yang diperlukan penggunaannya oleh petani, mengingat kontribusinya yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian;
- d. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- e. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu mengatur Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang...

DAG/PER/7/2006 tentang Perubahan atas Lampiran 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 /Permentan/SR.140/2/2007) tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Anorganik;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 /Permentan/OT.140/4/2007) tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.02/2/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140 /8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140 /10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/ PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/ SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor/ 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/ SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/ 2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;

23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/ 5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
24. Keputusan Bupati Minahasa Selatan Nomor 107 Tahun 2008 tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Minahasa Selatan.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2015 Tanggal 21 Januari 2015 Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Direktur Jenderal adalah Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki tugas dan fungsinya diantaranya di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
8. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
9. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai

Produktivitas...

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara... 3. Undang-undang... Tahun Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4403);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah peraturan pemerintah pengganti dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi, Sebagai Barang dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 34/M-DAG/PER/10/2006 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.27/M-

produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007;

11. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di Lini IV;
12. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
13. Harga Pupuk Penjualan (HPP) adalah struktur biaya pengadaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
14. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk;
15. Sektor Pertanian adalah Sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang;
16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan hortikultura;
17. Pekebun adalah Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
18. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha;
19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
20. Produsen adalah produsen pupuk yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) beserta anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi Pupuk An-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri;
21. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
23. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;

25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati Minahasa Selatan;

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal;
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

Pasal 4

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tersebut dalam lampiran IV sampai lampiran VIII peraturan ini;

Pasal 5

Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertimbangkan rekap RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten;

Pasal 6

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 7

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor;
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten sebagaimana diatur dalam lampiran III peraturan ini;
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

BAB IV **PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh produsen;

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten/Kota.

Pasal 10

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyalur di lini II dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen berkoordinasi dengan Dinas setempat untuk penyerapan Pupuk Bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg;
 - Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg;
 - Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg;
 - Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg;
 - Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - Pupuk Urea = 50 kg;
 - Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - Pupuk ZA = 50 kg;
 - Pupuk NPK = 50 kg atau 20 kg;
 - Pupuk Organik = 40 kg atau 20 kg.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.



Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2015
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

| No. | Pengelola | Paraf |
|-----|---|---|
| 1. | Kepala Bidang Tanaman Pangan | U ^{15/2-15} |
| 2. | Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan |  |
| 3. | Kabag. Hukum/SDA Setda Kab. Minahasa Selatan |  |
| 4. | Kepala BP4K Kab. Minahasa Selatan |  |
| 5. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan |  |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan |  |
| 7. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan |  |
| 8. | Asisten II Setda Kab. Minahasa Selatan |  |
| 9. | Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Selatan |  |
| 10. | Bupati Minahasa Selatan | Untuk ditanda tangani |

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal

2015

BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal

2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581023 198103 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah, kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;

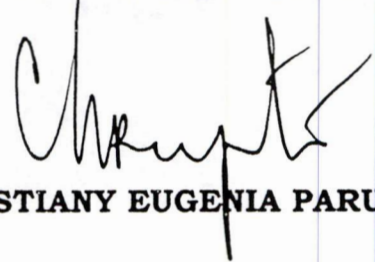
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2015
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 2015


BUPATI MINAHASA SELATAN



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,



Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581023 198103 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2015
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 19 Januari 2015

BUPATI MINAHASA SELATAN



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

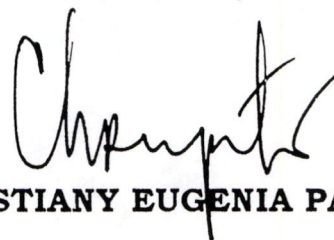
Lampiran I : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Tahun 2015

| NO. | SUB SEKTOR | KEBUTUHAN PUPUK (ton) | | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------|-------|----|---------------|
| | | UREA | SP-36 | NPK | ZA | PUPUK ORGANIK |
| 1 | TANAMAN PANGAN | 2,013 | 561 | 1,812 | 64 | 354 |
| 2 | HORTIKULTURA | 112 | 108 | 134 | 2 | 24 |
| 3 | PETERNAKAN | 59 | 4 | 25 | 1 | 10 |
| 4 | PERKEBUNAN | 86 | 214 | 186 | 2 | 35 |
| 5 | PERIKANAN BUDIDAYA | 70 | 4 | 12 | - | 2 |
| JUMLAH | | 2,340 | 891 | 2,169 | 69 | 425 |

BUPATI MINAHASA SELATAN



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran II : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR :

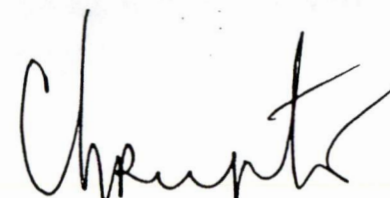
TANGGAL :

TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PER BULAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

| NO. | JENIS PUPUK | Total (ton) | Kebutuhan Pupuk (ton) | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | UREA | 2,340 | 263 | 139 | 261 | 272 | 295 | 98 | 107 | 61 | 113 | 229 | 231 | 271 |
| 2 | SP-36 | 891 | 100 | 88 | 95 | 64 | 93 | 71 | 80 | 51 | 39 | 48 | 84 | 78 |
| 3 | NPK | 2,169 | 116 | 123 | 181 | 161 | 304 | 169 | 171 | 169 | 132 | 161 | 188 | 294 |
| 4 | ZA | 69 | 0 | 12 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 5 | PUPUK ORGANIK | 425 | 50 | 29 | 52 | 43 | 46 | 39 | 31 | 30 | 30 | 23 | 31 | 21 |

BUPATI MINAHASA SELATAN



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran III : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

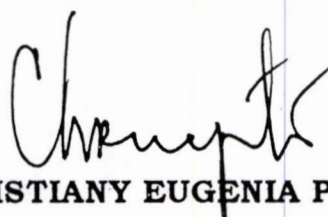
TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015

**Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya]
MENURUT KECAMATAN SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

| NO. | KECAMATAN | KEBUTUHAN PUPUK (ton) | | | | |
|-------------|----------------|-----------------------|------|-------|----|---------------|
| | | UREA | SP36 | NPK | ZA | PUPUK ORGANIK |
| 1 | MODOINDING | 118 | 69 | 125 | 6 | 40 |
| 2 | MAESAAN | 228 | 74 | 171 | 3 | 27 |
| 3 | TOMPASO BARU | 228 | 79 | 178 | 3 | 27 |
| 4 | RANOYAPO | 232 | 75 | 175 | 6 | 27 |
| 5 | MOTOLING | 31 | 34 | 90 | 3 | 16 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 46 | 36 | 97 | 3 | 22 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 46 | 36 | 99 | 3 | 22 |
| 8 | KUMELEMBUAI | 33 | 28 | 85 | 3 | 17 |
| 9 | SINONSAYANG | 229 | 71 | 151 | 6 | 28 |
| 10 | TENGA | 238 | 72 | 161 | 6 | 28 |
| 11 | AMURANG BARAT | 231 | 57 | 154 | 6 | 29 |
| 12 | AMURANG | 20 | 28 | 85 | 3 | 19 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 164 | 46 | 123 | 3 | 27 |
| 14 | TUMPAAN | 170 | 56 | 125 | 6 | 27 |
| 15 | TATAPAAAN | 180 | 61 | 130 | 6 | 29 |
| 16 | SULTRA | 74 | 34 | 105 | 3 | 17 |
| 17 | TARERAN | 74 | 34 | 116 | 3 | 23 |
| J U M L A H | | 2,340 | 891 | 2,169 | 69 | 425 |

BUPATI MINAHASA SELATAN



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

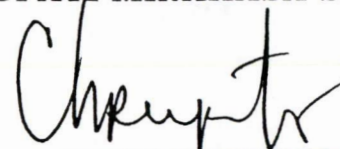
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PUPUK SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

JENIS PUPUK : UREA

| NO. | KECAMATAN | Total (ton) | Kebutuhan Pupuk (ton) | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | MODOINDING | 121 | 18 | 18 | 18 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | MAESAAN | 242 | 28 | 28 | 28 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 3 | TOMPASO BARU | 242 | 28 | 28 | 28 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4 | RANOYAPO | 246 | 28 | 28 | 28 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 5 | MOTOLING | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 42 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 42 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | KUMELEMBUAI | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | SINONSAYANG | 242 | 28 | 28 | 28 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 | TENGA | 240 | 29 | 29 | 29 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 11 | AMURANG BARAT | 232 | 26 | 26 | 26 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 12 | AMURANG | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 150 | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| 14 | TUMPAAN | 156 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 16 | 20 |
| 15 | TATAPAAAN | 166 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 16 | SULTRA | 68 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | TARERAN | 76 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| J U M L A H | | 2,340 | 269 | 269 | 269 | 208 | 102 | 102 | 102 | 102 | 222 | 224 | 226 | 246 |

BUPATI MINAHASA SELATAN



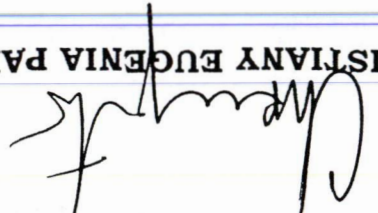
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PUPUK SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

JENIS PUPUK : SP36

| NO. | KECAMATAN | Total (ton) | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
|--------|----------------|-------------|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 1 | MODONDING | 67 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 2 | MAESAN | 72 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 |
| 3 | TOMPASO BARU | 77 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 |
| 4 | RANOYAPO | 74 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 |
| 5 | MOTOLING | 38 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 40 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 40 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 8 | KUMELMBAI | 31 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | SINONSAYANG | 69 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 |
| 10 | TENGA | 70 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 |
| 11 | AMURANG BARAT | 56 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | AMURANG | 27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 45 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 14 | TUMPAAN | 56 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 15 | TATAPAAAN | 63 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 16 | SULTRA | 34 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 17 | TARERAN | 34 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| JUMLAH | | | 891 | 128 | 119 | 116 | 57 | 25 | 25 | 25 | 27 | 62 | 120 | 130 |

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran VI : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

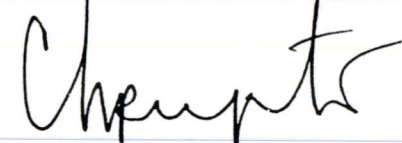
: ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PUPUK SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

JENIS PUPUK : **NPK**

| NO. | KECAMATAN | Total (ton) | Kebutuhan Pupuk (ton) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | MODOINDING | 132 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 2 | MAESAAN | 179 | 24 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 24 | 24 |
| 3 | TOMPASO BARU | 187 | 26 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 24 | 26 |
| 4 | RANOYAPO | 184 | 24 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 26 | 26 |
| 5 | MOTOLING | 100 | 21 | 18 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 13 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 103 | 18 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 104 | 20 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 |
| 8 | KUMELEMBUAI | 90 | 20 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| 9 | SINONSAYANG | 158 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| 10 | TENGA | 170 | 26 | 23 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 18 | 18 |
| 11 | AMURANG BARAT | 163 | 21 | 21 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 21 | 23 |
| 12 | AMURANG | 90 | 20 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 129 | 16 | 16 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 |
| 14 | TUMPAAN | 132 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 15 | TATAPAAAN | 137 | 16 | 16 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 16 | SULTRA | 111 | 20 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| 17 | TARERAN | 122 | 15 | 15 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| J U M L A H | | 2,169 | 321 | 292 | 241 | 98 | 94 | 94 | 94 | 93 | 121 | 174 | 261 | 285 |

BUPATI MINAHASA SELATAN



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

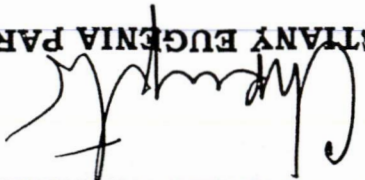
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PUPUK SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

JENIS PUPUK : ZA

| NO. | KECAMATAN | Total (ton) | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
|--------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | MODONDING | 7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | MAESAN | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 3 | TOMPASO BARU | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 4 | RANOYAPO | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 5 | MOTOLING | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 8 | KUMELMBUAI | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 9 | SINONSAYANG | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 10 | TENGA | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 11 | AMURANG BARAT | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 12 | AMURANG | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 14 | TUMPAAN | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 15 | TATAPAAAN | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 16 | SULTRA | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 17 | TAREERAN | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| JUMLAH | | | 69 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 |

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran VIII : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

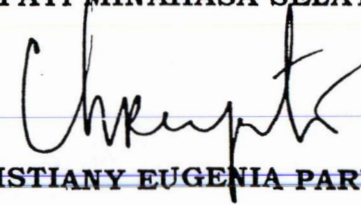
TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PUPUK SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

JENIS PUPUK : **ORGANIK**

| NO. | KECAMATAN | Total (ton) | Kebutuhan Pupuk (ton) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | MODOINDING | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | MAESAAN | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | TOMPASO BARU | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | RANOYAPO | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | MOTOLING | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | KUMELEMBUAI | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | SINONSAYANG | 28 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | TENGA | 28 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | AMURANG BARAT | 29 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | AMURANG | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | TUMPAAN | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | TATAPAAAN | 29 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | SULTRA | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | TARERAN | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| J U M L A H | | 425 | 77 | 75 | 44 | 36 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 55 | 56 |

BUPATI MINAHASA SELATAN



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

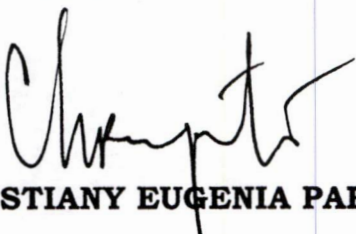
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2015
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

| No. | Pengelola | Paraf |
|-----|---|---|
| 1. | Kepala Bidang Tanaman Pangan | U ^{15/2-15} |
| 2. | Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan |  |
| 3. | Kabag. Hukum/SDA Setda Kab. Minahasa Selatan |  |
| 4. | Kepala BP4K Kab. Minahasa Selatan |  |
| 5. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan |  |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan |  |
| 7. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan |  |
| 8. | Asisten II Setda Kab. Minahasa Selatan |  |
| 9. | Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Selatan |  |
| 10. | Bupati Minahasa Selatan | Untuk ditanda tangani |

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal

2015

BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal

2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19581023 198103 1 012

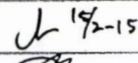








BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015

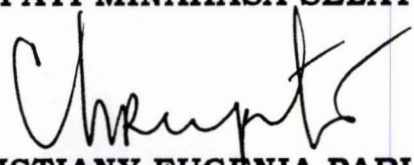
Lampiran I : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Tahun 2015

| NO. | SUB SEKTOR | KEBUTUHAN PUPUK (ton) | | | | |
|--------|--------------------|-----------------------|-------|-------|----|---------------|
| | | UREA | SP-36 | NPK | ZA | PUPUK ORGANIK |
| 1 | TANAMAN PANGAN | 2,013 | 561 | 1,812 | 64 | 354 |
| 2 | HORTIKULTURA | 112 | 108 | 134 | 2 | 24 |
| 3 | PETERNAKAN | 59 | 4 | 25 | 1 | 10 |
| 4 | PERKEBUNAN | 86 | 214 | 186 | 2 | 35 |
| 5 | PERIKANAN BUDIDAYA | 70 | 4 | 12 | - | 2 |
| JUMLAH | | 2,340 | 891 | 2,169 | 69 | 425 |

| No | Pengelola | Paraf |
|-----|---|---|
| 1. | Kepala Bidang Tanaman Pangan |  |
| 2 | Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan |  |
| 3. | Kabag. Hukum/SDA Setda Kab. Minahasa Selatan |  |
| 4. | Kepala BP4K Kab. Minahasa Selatan |  |
| 5. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan |  |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan |  |
| 7. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan |  |
| 8. | Asisten II Setda Kab. Minahasa Selatan |  |
| 9. | Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Selatan |  |
| 10. | Bupati Minahasa Selatan | Untuk ditanda tangani |

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran II : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

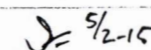








NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PER BULAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

| NO. | JENIS PUPUK | Total (ton) | Kebutuhan Pupuk (ton) | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | UREA | 2,340 | 263 | 139 | 261 | 272 | 295 | 98 | 107 | 61 | 113 | 229 | 231 | 271 |
| 2 | SP-36 | 891 | 100 | 88 | 95 | 64 | 93 | 71 | 80 | 51 | 39 | 48 | 84 | 78 |
| 3 | NPK | 2,169 | 116 | 123 | 181 | 161 | 304 | 169 | 171 | 169 | 132 | 161 | 188 | 294 |
| 4 | ZA | 69 | 0 | 12 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 |
| 5 | PUPUK ORGANIK | 425 | 50 | 29 | 52 | 43 | 46 | 39 | 31 | 30 | 30 | 23 | 31 | 21 |

| No | Pengelola | Paraf |
|-----|---|---|
| 1. | Kepala Bidang Tanaman Pangan |  |
| 2 | Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan |  |
| 3. | Kabag. Hukum/SDA Setda Kab. Minahasa Selatan |  |
| 4. | Kepala BP4K Kab. Minahasa Selatan |  |
| 5. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan |  |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan |  |
| 7. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan |  |
| 8. | Asisten II Setda Kab. Minahasa Selatan |  |
| 9. | Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Selatan |  |
| 10. | Bupati Minahasa Selatan | Untuk ditanda tangani |

BUPATI MINAHASA SELATAN



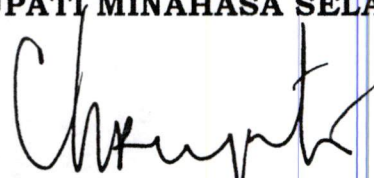
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran III : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

| NO. | KECAMATAN | KEBUTUHAN PUPUK (ton) | | | | |
|--------|----------------|-----------------------|------|-------|----|---------------|
| | | UREA | SP36 | NPK | ZA | PUPUK ORGANIK |
| 1 | MODOINDING | 118 | 69 | 125 | 6 | 40 |
| 2 | MAESAAN | 228 | 74 | 171 | 3 | 27 |
| 3 | TOMPASO BARU | 228 | 79 | 178 | 3 | 27 |
| 4 | RANOYAPO | 232 | 75 | 175 | 6 | 27 |
| 5 | MOTOLING | 31 | 34 | 90 | 3 | 16 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 46 | 36 | 97 | 3 | 22 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 46 | 36 | 99 | 3 | 22 |
| 8 | KUMELEMBUAI | 33 | 28 | 85 | 3 | 17 |
| 9 | SINONSAYANG | 229 | 71 | 151 | 6 | 28 |
| 10 | TENGA | 238 | 72 | 161 | 6 | 28 |
| 11 | AMURANG BARAT | 231 | 57 | 154 | 6 | 29 |
| 12 | AMURANG | 20 | 28 | 85 | 3 | 19 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 164 | 46 | 123 | 3 | 27 |
| 14 | TUMPAAN | 170 | 56 | 125 | 6 | 27 |
| 15 | TATAPAAAN | 180 | 61 | 130 | 6 | 29 |
| 16 | SULTRA | 74 | 34 | 105 | 3 | 17 |
| 17 | TARERAN | 74 | 34 | 116 | 3 | 23 |
| JUMLAH | | 2,340 | 891 | 2,169 | 69 | 425 |

| No | Pengelola | Paraf |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Kepala Bidang Tanaman Pangan | J2 9/2/15 |
| 2 | Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan | |
| 3. | Kabag. Hukum/SDA Setda Kab. Minahasa Selatan | |
| 4. | Kepala BP4K Kab. Minahasa Selatan | |
| 5. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan | |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan | |
| 7. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan | |
| 8. | Asisten II Setda Kab. Minahasa Selatan | |
| 9. | Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Selatan | |
| 10. | Bupati Minahasa Selatan | Untuk ditanda tangani |

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN


ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PUPUK SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

JENIS PUPUK : UREA

| NO. | KECAMATAN | Total (ton) | Kebutuhan Pupuk (ton) | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | MODOINDING | 121 | 18 | 18 | 18 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | MAESAAN | 242 | 28 | 28 | 28 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 3 | TOMPASO BARU | 242 | 28 | 28 | 28 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4 | RANOYAPO | 246 | 28 | 28 | 28 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 5 | MOTOLING | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 42 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 42 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 8 | KUMELEMBUAI | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | SINONSAYANG | 242 | 28 | 28 | 28 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 10 | TENGA | 240 | 29 | 29 | 29 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 11 | AMURANG BARAT | 232 | 26 | 26 | 26 | 22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21 | 22 | 22 | 22 |
| 12 | AMURANG | 18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 150 | 16 | 16 | 16 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 |
| 14 | TUMPAAN | 156 | 16 | 16 | 16 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 18 | 16 | 20 |
| 15 | TATAPAAAN | 166 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 | 20 |
| 16 | SULTRA | 68 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17 | TARERAN | 76 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| J U M L A H | | 2,340 | 269 | 269 | 269 | 208 | 102 | 102 | 102 | 102 | 222 | #### | 226 | 246 |

| No | Pengelola | Paraf |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Kepala Bidang Tanaman Pangan | 2/5/15 |
| 2 | Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan | |
| 3. | Kabag. Hukum/SDA Setda Kab. Minahasa Selatan | |
| 4. | Kepala BP4K Kab. Minahasa Selatan | |
| 5. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan | |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan | |
| 7. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan | |
| 8. | Asisten II Setda Kab. Minahasa Selatan | |
| 9. | Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Selatan | |
| 10. | Bupati Minahasa Selatan | Untuk ditanda tangani |

BUPATI MINAHASA SELATAN


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran V : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PUPUK SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

JENIS PUPUK : SP36

| NO. | KECAMATAN | Total (ton) | Kebutuhan Pupuk (ton) | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | MODOINDING | 67 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 2 | MAESAAN | 72 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 |
| 3 | TOMPASO BARU | 77 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 |
| 4 | RANOYAPO | 74 | 11 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 |
| 5 | MOTOLING | 38 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 40 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 40 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| 8 | KUMELEMBUAI | 31 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 9 | SINONSAYANG | 69 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 |
| 10 | TENGA | 70 | 11 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 |
| 11 | AMURANG BARAT | 56 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | AMURANG | 27 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 45 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 14 | TUMPAAN | 56 | 10 | 10 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 15 | TATAPAAAN | 63 | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| 16 | SULTRA | 34 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| 17 | TARERAN | 34 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| J U M L A H | | 891 | 128 | 119 | 116 | 57 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 62 | 120 | 130 |

| No | Pengelola | Paraf |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Kepala Bidang Tanaman Pangan | <i>[Signature]</i> |
| 2 | Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan | <i>[Signature]</i> |
| 3. | Kabag. Hukum/SDA Setda Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 4. | Kepala BP4K Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 5. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 7. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan | <i>[Signature]</i> |
| 8. | Asisten II Setda Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 9. | Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 10. | Bupati Minahasa Selatan | Untuk ditanda tangani |

BUPATI MINAHASA SELATAN

[Signature]
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran VI : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PUPUK SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

JENIS PUPUK : NPK

| NO. | KECAMATAN | Total (ton) | Kebutuhan Pupuk (ton) | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|--------------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | MODOINDING | 132 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 2 | MAESAAN | 179 | 24 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 24 | 24 |
| 3 | TOMPASO BARU | 187 | 26 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 24 | 26 |
| 4 | RANOYAPO | 184 | 24 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 26 | 26 |
| 5 | MOTOLING | 100 | 21 | 18 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 13 | 13 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 103 | 18 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 104 | 20 | 15 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 18 |
| 8 | KUMELEMBUAI | 90 | 20 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| 9 | SINONSAYANG | 158 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| 10 | TENGA | 170 | 26 | 23 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 16 | 18 | 18 |
| 11 | AMURANG BARAT | 163 | 21 | 21 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 21 | 23 |
| 12 | AMURANG | 90 | 20 | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | 13 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 129 | 16 | 16 | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 16 |
| 14 | TUMPAAN | 132 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 |
| 15 | TATAPAAH | 137 | 16 | 16 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| 16 | SULTRA | 111 | 20 | 16 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 |
| 17 | TARERAN | 122 | 15 | 15 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| JUMLAH | | 2,169 | 321 | 292 | 241 | 98 | 94 | 94 | 94 | 93 | 121 | 174 | 261 | 285 |

| No | Pengelola | Paraf |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Kepala Bidang Tanaman Pangan | <i>[Signature]</i> |
| 2. | Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan | <i>[Signature]</i> |
| 3. | Kabag. Hukum/SDA Setda Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 4. | Kepala BP4K Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 5. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 7. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan | <i>[Signature]</i> |
| 8. | Asisten II Setda Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 9. | Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 10. | Bupati Minahasa Selatan | Untuk ditanda tangani |

BUPATI MINAHASA SELATAN

[Signature]
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Lampiran VII : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2015
DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PUPUK SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

JENIS PUPUK : ZA

| NO. | KECAMATAN | Total (ton) | Kebutuhan Pupuk (ton) | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-----------------------|-----|-----|-------|-----|------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | MODOINDING | 7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | MAESAAN | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 3 | TOMPASO BARU | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 4 | RANOYAPO | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 5 | MOTOLING | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 8 | KUMELEMBUAI | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 9 | SINONSAYANG | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 10 | TENGA | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 11 | AMURANG BARAT | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 12 | AMURANG | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 14 | TUMPAAN | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 15 | TATAPAAAN | 6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 16 | SULTRA | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 17 | TARERAN | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| JUMLAH | | 69 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 |

| No | Pengelola | Paraf |
|-----|---|-----------------------|
| 1. | Kepala Bidang Tanaman Pangan | <i>[Signature]</i> |
| 2 | Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan | <i>[Signature]</i> |
| 3. | Kabag. Hukum/SDA Setda Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 4. | Kepala BP4K Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 5. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 7. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan | <i>[Signature]</i> |
| 8. | Asisten II Setda Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 9. | Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 10. | Bupati Minahasa Selatan | Untuk ditanda tangani |

BUPATI MINAHASA SELATAN

[Signature]
CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

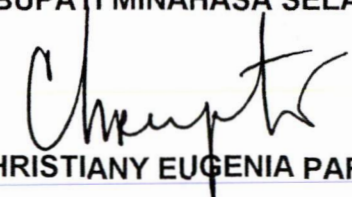
ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2015
(Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan Budidaya)
MENURUT KECAMATAN DAN JENIS PUPUK SE KABUPATEN MINAHASA SELATAN

JENIS PUPUK : ORGANIK

| NO. | KECAMATAN | Total (ton) | Kebutuhan Pupuk (ton) | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | JAN | FEB | MAR | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGT | SEPT | OKT | NOV | DES |
| 1 | MODOINDING | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | MAESAAN | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | TOMPASO BARU | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | RANOYAPO | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | MOTOLING | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | MOTOLING TIMUR | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 7 | MOTOLING BARAT | 22 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | KUMELEMBUAI | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | SINONSAYANG | 28 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | TENGA | 28 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11 | AMURANG BARAT | 29 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12 | AMURANG | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | AMURANG TIMUR | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 14 | TUMPAAN | 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 15 | TATAPAAAN | 29 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 16 | SULTRA | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | TARERAN | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| JUMLAH | | 425 | 77 | 75 | 44 | 36 | 11 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 55 | 56 |

| No | Pengelola | Paraf |
|-----|---|---------------------------|
| 1. | Kepala Bidang Tanaman Pangan | <i>[Signature]</i> 5/2-18 |
| 2. | Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan | <i>[Signature]</i> |
| 3. | Kabag. Hukum/SDA Setda Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 4. | Kepala BP4K Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 5. | Kepala Dinas Perkebunan Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 6. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 7. | Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan | <i>[Signature]</i> |
| 8. | Asisten II Setda Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 9. | Sekretaris Daerah Kab. Minahasa Selatan | <i>[Signature]</i> |
| 10. | Bupati Minahasa Selatan | Untuk ditanda tangani |

BUPATI MINAHASA SELATAN


 CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU